

Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019

Internal Conflict between the Regent and Deputy Regent of Aceh Besar in 2019

Rahmad Muhajir^{1)*}, Leo Agustino²⁾ & Muradi³⁾

¹Program Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 30 April 2021; Direview: 30 April 2021; Disetujui: 29 Mei 2021

*Corresponding Email: rahmadmuhajir5@gmail.com

Abstrak

Pilkada Aceh Besar 2017 diawali dengan keinginan masyarakat akan adanya sebuah pemerintahan baru yang lebih baik di Aceh Besar, dan pada akhirnya pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab berhasil menang dengan meraih suara sebesar 110.074 atau unggul dengan 57, 10%. Kemenangan ini diperoleh dari 18 kecamatan dari total 23 kecamatan, namun setelah setahun menduduki jabatan Bupati dan wakilnya timbul sebuah konflik internal diantara keduanya. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang penyebab dari konflik tersebut, sehingga apabila dimungkinkan bisa didapatkan adanya resolusi dari konflik ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kedua tokoh daerah tersebut (bupati dan wakil bupati) serta orang-orang yang berada didalam pusaran konflik tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan konflik dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara keduanya dimana bupati merasa wewenang dan tugas kerja sudah sesuai dengan posisi administrasi masing-masing. Namun, menurut wakil bupati ada kesepakatan diantara keduanya yang belum terpenuhi sehingga timbul konflik antara bupati dan wakil bupati tetapi konflik ini dapat diselesaikan dengan baik melalui diskusi atau musyawarah yang difasilitasi pula oleh pihak ketiga.

Kata Kunci: Pilkada; Konflik; Kewenangan; Elite; Resolusi

Abstract

The 2017 Aceh Besar Pilkada began with the people's desire for a new, better government in Aceh Besar, and in the end the candidate pairs of regents and vice regents namely Mawardi Ali and Tgk Husaini A Wahab won by winning 110,074 votes or winning with 57, 10%. This victory was obtained from 18 sub-districts out of a total of 23 sub-districts, but after a year of serving as the Regent and his deputy, an internal conflict arose between the two. This research was conducted to dig deeper into the causes of the conflict, so that if possible, a resolution of this conflict could be obtained. The research method used is qualitative in which data is obtained through direct interviews with the two regional leaders (regent and deputy regent) and people who are in the vortex of the conflict. The results of this study indicate the conflict is due to differences in views between the two where the regent feels that his authority and work assignments are in accordance with their respective administrative positions. However, according to the deputy regent there is an agreement between the two that has not been fulfilled, resulting in conflict between the regent and deputy regent, but this conflict can be resolved properly through discussions or deliberations facilitated by a third party.

Keywords: Pilkada; Conflict; Authority; Elite; Resolution

How to Cite: Muhajir, R. Agustiono, L. & Muradi (2021). Konflik Internal antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 503-511.



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah proses pemilihan langsung yang dilakukan untuk menentukan pemimpin di sebuah daerah, ini adalah definisi dan asumsi umum yang sering menjadi pemahaman yang ada dalam masyarakat pada umumnya, namun substansi dari pilkada tidaklah sesederhana penjabaran yang telah peneliti uraikan tadi, pilkada menjadi sebuah aspek yang sangat penting didalam sebuah negara yang berasaskan demokrasi, pilkada sendiri menjadi sebuah keharusan demi pemenuhan pemerintahan yang lebih berdemokrasi, dalam rangka melepaskan diri dari cengkraman atau tekanan dari partai politik yang menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih akuntabilitas kepada konstituennya yaitu rakyat di daerah (Hanafi, 2014).

Pilkada sebagai sebuah urgensi dari peningkatan demokrasi yang telah kita bahas tadi memberikan gambaran dan merupakan sebuah fase dari demokrasi itu sendiri, dalam banyak tulisan kita menemukan pakar politik mengemukakan konsolidasi demokrasi sebagai tahapan menuju pemerintahan yang demokrasi, makna konsolidasi sendiri dipahami sebagai pembangunan segala elemen didalam sebuah negara itu sendiri, dalam hal mengakhiri sebuah rezim yang otoriter, oligarki, dinasti dan segala rezim yang bersifat memonopoli. Seperti halnya dalam sebuah tulisan yang memuat pernyataan dari pakar politik Guillermo O'Donnell, dimana konsolidasi demokrasi merupakan fase dimana ketahanan dan stabilitas demokrasi itu terjadi didalam sebuah pemerintahan atau rezim, yang artinya demokrasi berjalan dengan semestinya dan menjadi rezim yang dijalankan dan menjadi landasan pemerintahan sedangkan pakar lainnya seperti Larry Diamond menyatakan konsolidasi merupakan sebuah legitimasi demokrasi yang kuat dan diterima secara luas didalam masyarakat sebagai sebuah rezim yang digunakan dan diterima oleh masyarakat tersebut (Hatta, 2017).

Ditahap pemerintahan daerah kita juga menemukan sebuah upaya konsolidasi demokrasi yang baik, yang berawal dari adanya sebuah keinginan yang kuat dari masyarakat akan adanya perubahan didalam badan pemerintahan daerah Aceh Besar sebagai salah satu Kabupaten Aceh, dan keinginan tersebut berhasil diwujudkan pada Pilkada Aceh Besar 2017, dimana pada pilkada tersebut masyarakat mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih bukanlah dari kader Partai yang dominan di wilayah Aceh, masyarakat menginginkan adanya sebuah pemerintahan yang berbeda.

Dalam sebuah penelitian disebutkan salah satu factor yang menimbulkan keinginan perubahan dalam pemerintahan daerah tersebut, dikarenakan adanya indikasi pemerintahan daerah sebelumnya ditahun 2012-2017 bersifat eksklusivitas dan oligarki, maka dari itu rakyat di daerah itu menghendaki adanya perubahan dari pemerintahan yang selanjutnya melalui pilkada 2017, dimana pada pilkada 2017 tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab, dari hasil perhitungan dari 802 TPS, pasangan ini meraih suara sebesar 110.074 atau unggul dengan 57,10%. Kemenangan ini diperoleh dari 18 kecamatan dari total 23 kecamatan di wilayah Aceh Besar (Rizki, 2018)

Keikutsertaan Mawardi Ali pada pilkada sebelumnya di Tahun 2012, pada saat itu Mawardi Ali belum berhasil memenangkan pilkada dengan memperoleh 41,309 suara atau 23,17%, artinya ada sebuah perbedaan disaat Mawardi Ali mencalonkan diri sebagai bupati ditahun 2012 dan tahun 2017, salah satu yang terlihat jelas adalah wakilnya yaitu Tgk Husaini A Wahab, didalam artikel tersebut juga menjabarkan bahwa sosok Tgk Husaini A Wahab ini memiliki pengaruh dan dukungan politik yang cukup besar, hal ini didasarkan akan keselarasan visi misi dan karakter pasangan calon tersebut.

Ada nilai tambah tersendiri yang diberikan oleh calon Wakil bupati Tgk Husaini A Wahab, faktor tambahan tersebut lebih mengarah kepada ketokohan dimana sebagai salah satu ulama besar dalam tulisan Artikel Strategi kemenangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab tersebut, Tgk Husaini A Wahab merupakan ketua dari Himpunan Ulama Dayah Aceh Besar (HUDA), dimana hal tersebut dapat meningkatkan jumlah nilai dukungan suara yang bersumberkan dari para



santri, para ulama, yang para ulama tersebut adalah ulama-ulama yang berpengaruh diwilayah Aceh Besar (Rizki, 2018).

Pasangan ini pula didukung oleh koalisi 9 partai yang mendukung pasangan Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab yaitu partai Golkar, PDIP, PNA, PBB, PKB, Hanura, dan PAN yang merupakan partai Mawardi Ali, PNA, lalu PDA sebagai partai Tgk Husaini A Wahab. Koalisi ini bersepakat dan bersatu dalam sebuah visi misi yaitu membangun pemerintahan Aceh Besar yang lebih baik kedepannya yang didalam koalisi tersebut diisi oleh Partai lokal dan nasional dalam memperkuat dukungan dan kekuatan dukungan suara dari pendukung partai tersebut (Rizki, 2018).

Namun harapan masyarakat Aceh Besar akan pencapaian visi misi yang telah dibangun dengan baik oleh Bupati dan Wakilnya semasa kampanye, sepertinya menemui hambatan baru, yang hambatan ini muncul dari Bupati dan Wakil Bupati itu sendiri, hambatan itu berupa konflik yang timbul antara keduanya setelah satu tahun keberhasilan memenangkan Pilkada Aceh Besar 2017 yaitu Bupati Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab sebagai wakilnya.

Isu konflik antara bupati dan wakilnya pada pemerintahan Aceh Besar telah lama terdengar didalam masyarakat, namun isu tersebut akhirnya menjadi semakin jelas setelah adanya pemberitaan dimedia massa, dalam pemberitaan MODUS ACEH 24 Juli 2019 menyimpulkan bahwa Wakil Bupati Tgk Husaini A Wahab dalam sidang paripurna diwilayah Jantho Aceh Besar alih-alih menyampaikan kata sambutan, wakil bupati tersebut menyatakan tidak dilibatkan lebih jauh dalam pelaksanaan acara tersebut dan merasa posisinya sebagai wakil hanyalah cadangan dalam pemerintahan daerah tersebut.

Dalam MODUS ACEH pada 26 Oktober 2019 memberitakan bahwa Tgk Husaini A Wahab menyatakan bahwa Mawardi Ali sebagai Bupati telah bertindak tidak sesuai terhadap pemerintahan, dan Tgk Husaini A Wahab akan memperjuangkan Rakyat Aceh Besar. Pemberitaan tersebut kembali menggambarkan dengan jelas adanya sebuah konflik yang timbul antara Bupati dan Wakilnya, dimana indikasi awal konflik ini berupa adanya perbedaan wewenang dan kepentingan.

Minimnya informasi tentang konflik antara Bupati dan Wakilnya pada pemerintahan Aceh Besar ini merasa perlu untuk peneliti teliti, dikarenakan isu dan pemberitaan media tidaklah menjadi landasan yang kuat untuk menguak konflik yang sebenarnya terjadi antara Bupati dan Wakil bupati tersebut, dikarenakan konflik internal pemerintahan ini pastilah memberikan dampak yang tidak baik akan berjalannya pemerintahan Aceh Besar.

Konflik ini bisa berakibat kepada tingkat kepercayaan masyarakat akan pemerintahan kepada keterwakilan mereka dalam pemerintahan, dimana adanya kesenjangan yang timbul diakibatkan perbedaan antara harapan para terwakili dengan yang kinerja atau hasil yang diberikan oleh para wakil, perwakilan yang tidak selaras ini bisa dikatakan juga dengan 'a malfunctioning system' (Robert, 2004; Marijan, 2016).

Peneliti merasa perlu menggali lebih dalam baik dari wakil bupati dan Bupati sebagai dua aktor penting dalam pemerintahan yang sedang berkonflik, dikarenakan mereka berdua merupakan pusat permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru seperti terhambatnya pemerintahan, dan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kedepannya, indikasi yang didapat dari pemberitaan media dan isu yang berkembang tidaklah cukup untuk menggambarkan dan mengungkap penyebab dari konflik Bupati dan wakil nya tersebut.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jabarkan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap Konflik Bupati dan Wakilnya Pasca Pemenangan Pilkada Aceh Besar 2017 dan konfliknya, dengan penelitian kualitatif, metode kualitatif dirasa peneliti paling tepat untuk menggali fenomena ini, dikarenakan baik konflik elite tersebut berkaitan dengan perilaku individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya, maka objek individu yang berkonflik ini menjadi objek penelitian, seperti yang Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode

kualitatif adalah sebuah prosedur sebuah penelitian yang nantinya akan memberikan hasil sebuah penelitian dalam bentuk data deskriptif, data ini berbentuk ucapan maupun tulisan dan perilaku yang diamati dari individu-individu atau subjek itu sendiri (Yanuar, 2018), definisi tadi merupakan alasan mengapa metode kualitatif digunakan disini dikarenakan didalam fenomena konflik Bupati dan Wakil Bupati yang sedang diteliti, dua aktor atau elite tersebut sebagai individu yang menjadi subjek penelitian, dan juga beberapa orang yang dekat atau berkaitan dengan fenomena konflik tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dalam dua bentuk yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang telah ada sebelumnya, yang berupa tulisan-tulisan baik itu jurnal, buku, dan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yang menurut Jujun S. Surismantri menyatakan bahwa penelitian terapan ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah ada dan dipahami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan praktis (Ikbar, 2014). Lalu sumber data primer sebagai sumber data utama yang dilakukan dengan mewawancarai langsung Bupati dan wakilnya sebagai subjek penting dalam pembahasan ini, Lalu untuk memperkuat data Primer ini selain mewawancarai kedua aktor tersebut peneliti merasa perlu mewawancarai beberapa individu yang terkait atau berada disekeliling kedua aktor tersebut, seperti tim sukses pada saat pemenangan Pilkada Aceh Besar Tahun 2017 untuk melihat kemungkinan ini adalah konflik dari perjanjian dimasa lalu, dan perangkat pemerintahan daerah tersebut untuk melihat sudut pandang diluar pendapat kedua aktor, agar nantinya hasil data ini berimbang dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik merupakan sebuah fenomena yang jamak terjadi didalam sebuah interaksi yang timbul baik antara individu dan individu, maupun individu dan kelompok. Konflik sendiri merupakan hasil dari sebuah interaksi individu maupun kelompok, setiap individu maupun kelompok biasanya terbentuk dikarenakan adanya sebuah kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan, namun tujuan ini pula yang nantinya juga dapat menimbulkan konflik didalam sebuah asosiasi atau kelompok tersebut.

Konflik sendiri merupakan permasalahan yang akan selalu ada didalam masyarakat yang diakibatkan oleh hubungan yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri, konflik ini sendiri merupakan produk lain dari sebuah hubungan sosial yang terbangun didalam masyarakat, dikarenakan berbagai bentuk hubungan yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri (Zaini, 2018). Maka dapat dikatakan konflik adalah sebuah fenomena yang akan selalu ada didalam sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok besar maupun kecil, terstruktur, terorganisasi, dan atau tidak terstruktur (kelompok masyarakat biasa).

Maka dapat disimpulkan konflik itu pula terjadi dalam sebuah bangunan pemerintahan yang bersifat organisasi yang terstruktur dengan baik, seperti dalam pembahasan kali ini mengenai konflik internal pemerintahan Aceh Besar, konflik ini merupakan konflik internal yang timbul antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, yaitu antara Tgk. Husaini A. Wahab dengan Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali, fenomena konflik antara ketua dan wakil ini sangatlah memprihatinkan dikarenakan konflik yang timbul antara Bupati dan Wakilnya ini pastilah memberi dampak yang negatif terhadap pembangunan.

Konflik bisa muncul karena permasalahan pribadi maupun kelompok yang kesemuanya itu dilandaskan akan adanya sebuah kepentingan dari setiap yang berkonflik, yang umum kita lihat dalam sebuah pemerintahan daerah konflik itu timbul dari pihak luar yang tidak puas akan sebuah kebijakan atau pihak yang kalah dalam pemilihan tidak puas akan hasil pemilihan dan ada juga konflik dikarenakan adanya kubu didalam pemerintahan yang digantikan dengan kubu pemegang kekuasaan yang baru, konflik biasanya timbul dari pihak lain yang berada diluar sebuah kelompok tersebut, namun bagaimana kalau konflik itu justru timbul dari dalam sebuah kelompok yang memenangkan sebuah pemilihan dan telah menjabat dalam pemerintahan, pasti ini menjadi sebuah tanda tanya besar yang menurut peneliti perlu untuk digali lebih dalam.

Pemerintahan Aceh Besar memang terus berjalan dengan semestinya ketika konflik ini muncul dengan jelas ke publik ditahun 2019, setiap aktor yang terlibat didalam pemerintahan dan berkaitan langsung dengan konflik antara Bupati dan wakilnya ini memiliki sudut pandang yang berbeda, lalu perbedaan ini juga yang mendasari konflik tersebut muncul antara Bupati dan wakilnya.

Menurut Ir. Mawardi Ali sendiri sebagai Bupati Aceh Besar menyatakan bahwa konflik ini adalah sesuatu yang biasa terjadi, dikarenakan adanya sebatas beda pendapat dan pandangan saja, bukanlah konflik seperti yang digambarkan oleh media masa yang begitu memanas, Ir. Mawardi Ali sendiri merasa ini hanyalah perbedaan persepsi saja yang biasa timbul dan hilang setelah adanya diskusi dan komunikasi.

Maka dapat dikatakan bahwa walaupun menurut Ir. Mawardi Ali ini bukanlah konflik namun secara tidak langsung Ir. Mawardi Ali menyatakan bahwa memang ada pertentangan yang biasa timbul yang diakibatkan oleh adanya perbedaan sudut pandang, tujuan dan keinginan yang didasarkan perbedaan latar belakang masing-masing, yang seharusnya perbedaan-perbedaan tersebut telah disatukan saat dibentuknya koalisi antara mereka berdua.

Peneliti melihat adanya sebuah isu yang kuat berkembang didalam masyarakat dimana isu ini memang menjadi sesuatu yang sangat umum menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik didalam sebuah struktur atau asosiasi pemerintahan, isu tersebut merupakan masalah distribusi kekuasaan, didalam masyarakat sendiri beredar isu bahwa konflik ini karena tidak adilnya pembagian kekuasaan maupun wewenang.

Sedangkan menurut Tgk Husaini A. Wahab sendiri tidak sesederhana itu penyebab beliau berkonflik dengan Ir. Mawardi Ali, menurut Tgk Husaini A Wahab sendiri semua ini berawal dari adanya sebuah kesepakatan yang tidak terpenuhi dengan baik, kesepakatan tersebut berkaitan dengan kerjasama diantara keduanya yang menempatkan kedua sosok ini nantinya berdampingan dalam menjalankan pemerintahan nantinya, yang artinya tidak ada yang nomor satu dan nomor dua dalam menjalankan pemerintahan, sehingga perjanjian ini juga menjadi sebuah dasar Tgk Husaini A Wahab mau berdampingan dalam pemilukada Aceh Besar.

Pembagian wewenang ini memang agak sulit diseimbangkan apabila dibawa keranah struktural dimana semua telah diatur otoritas sesuai dengan jabatan dan kedudukan, sehingga apabila adanya keinginan dari satu pihak berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati namun tidak disepakati, pihak tadi dapat menunjukkan protes dikarenakan dalam konteks mendapatkan kekuasaan tadi ada pihak-pihak lain yang bersama dalam meraih kekuasaan tadi, seperti halnya Tgk. Husaini A. Wahab memiliki andil yang besar dalam kemenangan pilkada Aceh Besar 2014, sehingga jabatan Bupati dan wakilnya seperti sekarang ini bukanlah semata-mata kekuasaan sepihak dan dimiliki oleh sebelah pihak saja.

Bupati dan wakilnya dalam konflik internal ini memiliki pandangan tersendiri dimana menurut Bupati, setiap aspek yang ada dalam pemerintahan telah mendapatkan wewenang dan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan disisi wakil Bupati memang tidak bermaksud untuk mengambil alih kewenangan-kewenangan yang telah diatur, namun adanya pembagian wewenang yang lebih berimbang sesuai dengan kesepakatan awal sehingga wakil Bupati dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemerintahan sesuai dengan kemampuannya.

Sudut pandang Tgk. Husaini A. Wahab berkaitan dengan visi misi yang diusung pada masa kampanye dahulu yang berkaitan dengan budaya islami daerah tersebut sehingga dengan dimunculkan pasangan ulama dan umara ini menjadi daya tarik, dan Tgk. Husaini A. Wahab sendiri pada masa itu mengharapkan kerjasama ini dapat mewujudkan visi misi tersebut, jadi keinginan Tgk. Husaini A. Wahab disini tidaklah terbatas kepada pembagiaan kekuasaan secara berimbang, Tgk. Husaini A. Wahab ingin melaksanakan atau mewujudkan visi misi yang diusung semasa kampanye dengan ikut andilnya beliau didalam kinerja pemerintahan daerah tersebut secara lebih baik.

Dimana wakil bupati mengharapkan dapat bekerja sesuai dengan apa yang diberikan padanya, ini juga berkaitan dengan karakteristik dan prinsip dimana sebelum kita menerima hak, maka kita harus melakukan kewajiban, dan sebagai ulama yang menjadi perwakilan dipemerintahan Tgk. Husaini A. Wahab merasa perlu untuk terlibat dalam kebijakan-kebijakan berkaitan dengan agama yang sesuai dengannya.

Terlepas dari sudut pandang politisi dalam memandang kekuasaan dan distribusinya ini tetap saja konflik memang pada umumnya dikarenakan adanya perbedaan pembagian dan ketidak seimbangan

dalam pembagian kekuasaan, sehingga menurut Ralf Dahrendorf tata sosial ini terpelihara melalui proses penciptaan hubungan antara wewenang dalam berbagai tipe kelompok yang terkoordinasi secara merata dan menyeluruh ke segala lapisan sistem tersebut, wewenang dan kekuasaan sendiri menurut Ralf Dahrendorf merupakan sumber yang sedikit atau langka sehingga menimbulkan persaingan dan perselisihan antar kelompok dalam rangka memperebutkannya, yang teori ini disebutnya sebagai "koersi struktur sosial" (Rush Michael & Althoff Phillip, 2008).

Pembagian wewenang ataupun kekuasaan yang apabila diimplementasikan kedalam pemerintahan berbentuk kekuasaan seseorang memanglah sering menimbulkan konflik, dalam politik perebutan kekuasaan ini menjadi sebab timbulnya konflik internal, seperti sebuah definisi lainnya tentang penyebab konflik, didalam sebuah penelitian tentang penyebab konflik yang paling sering ditemui adalah perebutan kekuasaan, perbedaan tujuan, dan yang terakhir adalah masalah pembagian. Salah satu yang penyebab konflik dari tiga hal tadi adalah suatu pembagian yang tidaklah merata dan perubahan-perubahannya sering menjadi alasan terciptanya konflik (Hoogerwerf A, 1985).

Pembagian ini sangat erat kaitannya dengan dasar pembentukan pasangan bupati dan wakilnya semasa kampanye, selain itu kita dapat melihat sisi lain dari pada konflik tersebut dimana dalam pusaran konflik ini juga memiliki kaitan dengan dukungan atau pihak-pihak yang terkait dukungan pasangan calon ini semasa pemilu, umumnya dukungan ini diberikan agar aspirasi mereka nantinya dapat diwujudkan oleh bupati dan wakilnya setelah meraih puncak kekuasaan diwilayah tersebut, dan bentuk keinginan ini bisa berupa aspirasi, kedudukan, jabatan, atau posisi didalam pemerintahan.

Dalam konteks sosiologis, konflik sendiri mengacu pada upaya terselubung dari setiap individu-individu dan ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Konflik ini bisa terjadi antara dua orang atau lebih, lalu dalam bentuk asosiasi-asosiasi, kelompok politik, partai politik, kelompok agama dan budaya (Jaryd and Julian), seperti yang kita ketahui pada umumnya setelah satu kelompok berhasil menduduki jabatan, maka dari perwakilannya ini diharapkan dapat menuntaskan keinginan dari kelompok tersebut baik secara individu maupun keinginan kelompok.

Selain konflik ini dikarenakan adanya perjanjian yang telah dirubah atau dirasa tidak ditepati sebagai salah satu penyebab konflik, konflik ini juga bisa berasal dari adanya tuntutan kelompok yang telah memberi dukungan kepada pasangan tersebut, yang tuntutan tadi tidak dipenuhi, pada dasarnya keberhasilan pasangan Ir. Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A. Wahab ini juga berdasarkan adanya asosiasi yang kuat didalamnya semasa mencalonkan diri, maka asosiasi sendiri memiliki tujuan yang pastinya didalam asosiasi itu terjadi interaksi yang dapat menghasilkan konflik pula.

Masyarakat dini menurut Ralf Dahrendorf pasca kapitalisme modern menjadi bentuk masyarakat yang majemuk, yang berarti masyarakat tadi telah terbentuk kedalam beragam asosiasi seperti kelompok, negara, rumah sakit, perusahaan, dan bentuk asosiasi lain yang terkoordinir secara imperatif, kesemua asosiasi tadi memiliki dikotomi yang jelas tentang siapa pemegang otoritas dan tidak memegang otoritas, sehingga asosiasi ini berujung pada ajang dominasi dan konflik (Ikhwan, 2004). Namun yang menjadi ruang timbulnya konflik adalah bentuk asosiasi yang ikut dalam memenangkan pemilihan bukanlah berasal dari satu kelompok saja, melainkan ada beberapa kelompok baik itu kelompok masyarakat biasa, partai politik, kelompok keluarga, dan kelompok kepentingan yang dari setiap kelompok ini pastilah memiliki aspirasinya masing-masing.

Namun yang terlihat adalah Tgk. Husaini A. Wahab tidak memiliki otoritas yang cukup dalam mewujudkan aspirasi dari para pendukung beliau, sedangkan pendukung beliau bisa dikatakan cukup besar, dimana dapat dilihat dalam kajian terdahulu dukungan itu datang dari berbagai asosiasi baik partai politik, maupun asosiasi civil society seperti HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh Besar), belum lagi kelompok masyarakat yang mendukung beliau. Yang ke semua itu pastinya mengharapkan beliau dapat memberikan manfaat dari dukungan dan keberhasilan menggapai pemerintahan.

Konflik yang terjadi antara elite dapat dipahami dengan melihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah melihat motif dan kepentingan politiknya. Dalam pengertiannya konflik sendiri dipandang sebagai sebuah pertentangan terbuka antara pemegang kekuatan didalam politik dalam memperebutkan kekuasaan dalam bentuk jabatan, pertentangan terbuka ini dapat dilihat dengan jelas oleh orang umum (konflik antar elite) maka seperti kutipan tadi dapat dikatakan pada tahapan Tgk.

Husaini A Wahab yang tidak mendapat kejelasan dari Ir. Mawardi Ali tentang pendistribusian kekuasaan, wewenang, dan tata kelola tugas dari Tgk. Husaini A Wahab sendiri. Ditambah lagi dengan kondisi tim yang terus menanyakan tentang pendistribusian kekuasaan yang tidak mereka rasakan, menjadikan konflik ini tidak dapat terbendung lagi pada masa itu.

Konflik ini juga berkaitan dengan tim yang telah berjasa akan keberhasilan bupati dan wakil bupati menduduki jabatan, memang agak sulit untuk mengukur dan menimbang siapa yang nantinya akan diberikan peluang didalam manajemen pemerintahan dikarenakan tetap saja ruang yang ada didalam pemerintahan itu terbatas, maka perebutan untuk mengisi ruang ini juga menjadi sebuah pemicu konflik, seperti halnya definisi penyebab konflik antara lainnya, didalam sebuah hubungan yang dibangun dalam konteks politik, konflik ini muncul dikarenakan adanya keinginan untuk meraih kekuasaan dan jabatan, sumber daya dan posisi itu didalam kehidupan sifatnya sama yaitu terbatas, maka seperti posisi politik yang terbatas sifatnya yang menimbulkan perebutan sehingga memicu konflik, hal ini seperti dinyatakan Maswadi Rauf yang senada dengan Harold Laswell, menyatakan sebuah kompetisi dalam distribusi kekuasaan nantinya akan menimbulkan pertentangan politik dikarenakan posisi kekuasaan yang terbatas (Zaini, 2018).

Maswadi Rauf mengatakan dalam sebuah gejala sosial yang timbul didalam masyarakat akibat dari hubungan-hubungan yang terbangun didalamnya, selain konflik juga ada konsensus, konsensus atau umum dikenal dengan kompromi ini juga sering terjadi sebagai bagian untuk mengakhiri perbedaan yang menimbulkan konflik tadi (Zaini, 2018). Maka sudah sewajarnya seperti yang diutarakan Ir. Mawardi Ali selaku bupati bahwa didalam sebuah bangunan kekeluargaan dalam hal ini Bupati dan wakil sebagai kesatuan dalam memimpin daerah, pastilah terjadi interaksi dan hubungan yang terkadang memiliki perbedaan persepsi, namun interaksi ini pula yang nantinya memperbaiki keadaan yang memanas tadi.

Maka baik dari tim pasangan ini juga memiliki andil yang besar dalam kembalinya perdamaian antara kedua belah pihak, dengan memediasi dan mempersatukan kembali kedua tokoh ini yang tujuannya seperti disampaikan oleh tim sukses pasangan calon pada pilkada adalah agar visi misi dapat dilaksanakan, dimana yang dimaksud dari pemberian wewenang ini bukanlah wewenang mutlak menggantikan SK Bupati, namun ada koordinasi dengan wakil Bupati seperti yang menyangkut masalah keagamaan dikarenakan tujuan dibentuk pasangan ulama dan umara oleh tim putih agar adanya keseimbangan dalam pemerintahan dan adanya seseorang yang memang membidangi satu bagian seperti agama berikanlah kepada yang ahli.

Pihak ketiga yang bersikap lebih lunak dari kedua belah pihak yang berkonflik sangatlah penting, dimana pihak ketiga berupaya dan menjadi fasilitator komunikasi bagi keduanya, lalu mengklarifikasi persoalan, dan memformulasikan kesepakatan (Novri, 2019) dari banyak kasus dan fenomena konflik dalam dinamika politik kita dapat menemui pihak ketiga sangatlah dibutuhkan dalam terbentuknya sebuah perdamaian untuk mengakhiri konflik, ini yang kita lihat dimana tim yang baik adalah yang terus terhubung dengan perwakilan mereka yang telah menduduki jabatan, tim berperan tidak hanya sampai kepada kemenangan pemilu, tapi juga terus menjaga visi misi, harmonisasi, dan komunikasi agar sebuah pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik.

Fenomena konflik internal ini berangkat dari dibentuknya kedua pasangan calon yang memiliki perbedaan latar belakang yang memiliki kekuatan baik sosial, keilmuan maupun politik. Yang diawal diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan pemerintahan, dan untuk mewujudkan itu semua didasarkan kepada perjanjian sebagai pengikat dua tokoh yang berbeda ini, namun karena dalam perjalanan komunikasi ini terputus dan disatu sisi pada pelaksanaan pemerintahan satu pihak merasa ada kesepakatan yang diabaikan maka konflik itu timbul, jadi untuk meresolusi konflik ini adalah dengan membuat perjanjian baru dimana apabila masalahnya pada distribusi kekuasaan maka dilakukan redistribusi kekuasaan.

Kesepakatan baru ini juga akan sulit tercapai apabila kedua sosok ini menutup komunikasi, ada sikap positif yang ditunjukkan keduanya baik dalam keseharian maupun dalam rangka dinas seperti diutarakan oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas), dimana sikap tersebut sewaktu-waktu dapat menurunkan temperature konflik yang terasa antara keduanya, dimana karena komunikasi keduanya tidak benar-benar terputus, maka kesepakatan baru dapat disepakati oleh keduanya dan ditandatangani oleh Bupati sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Maka keberadaannya dalam pemerintahan bukan hanya sebagai sebuah simbolik perwakilan tertentu, namun memberikan pengaruh yang nyata dalam jalannya pemerintahan daerah Aceh Besar, dan kembali kepada fitrahnya Tgk Husaini A Wahab sendiri sebagai seorang pendamai, dan mendamaikan seperti yang diungkapkan oleh tim sukses pasangan calon pada pilkada akhirnya menerima dengan ikhlas perdamaian ini, dikarenakan dari dasar diri sendiri Tgk Husaini A Wahab tidaklah menginginkan konflik ini dan hanya memperjuangkan aspirasi dari pendukungnya.

Begitu pula dengan Ir. Mawardi Ali yang pada akhirnya membuka terciptanya kesepakatan baru dan memberikan wewenang kepada Tgk Husaini A Wahab sesuai dengan aspirasi dan keinginan Tgk Husaini A Wahab, karena menurut Ir. Mawardi Ali ini hanyalah masalah perbedaan persepsi dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, maka saat pertemuan dan diskusi ini dibuka Ir. Mawardi Ali menyepakati perjanjian tersebut, yang berarti walaupun diawal Ir. Mawardi Ali memang menjalankan pemerintahan sesuai dengan tupoksinya, saat ini Ir. Mawardi Ali telah berbagi kewenangan tersebut agar perdamaian ini dapat tercapai.

SIMPULAN

Konflik internal yang terjadi antara Bupati Aceh Besar dengan wakilnya ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara satu sama lain perihal kewenangan, dimana menurut Bupati kewenangan telah dijalankan dengan semestinya yaitu sesuai dengan aturan dalam struktur pemerintahan daerah tersebut, namun disisi lain wakil Bupati merasa ada perjanjian yang belum terpenuhi menyangkut dengan perjanjian mereka berdua semasa pencalonan diri, dimana perjanjian tersebut menyangkut dengan kinerja yang berarti berkaitan pula dengan kewenangan yang dimiliki keduanya, sehingga dengan kewenangan yang seimbang kedudukannya Wakil Bupati dapat memberikan kontribusi didalam pemerintahan. Selain itu juga beliau dapat ikut memenuhi visi misi yang menjadi harapan para pendukungnya baik dari segi tim sukses, masyarakat, dan elemen lain yang telah berkontribusi didalam kemenangan pada pilkada Aceh Besar tersebut, karena sudah sewajarnya dukungan ini diharapkan dapat mewujudkan harapan dan aspirasi para pendukung tadi setelah perwakilannya berhasil menduduki jabatan pemerintahan. Melihat sebuah disharmonisasi atau konflik internal ini pastilah memberi dampak yang kurang baik dalam pemerintahan, setiap aspek yang ada dalam pemerintahan dan diluar pemerintahan seperti tim sukses ikut berupaya untuk mengakhiri konflik tersebut sehingga terciptalah kesepakatan diantara keduanya untuk mengakhiri konflik internal tersebut, keberhasilan dalam mengakhiri konflik ini tidak terlepas dari peran tim sukses yang berupaya memediasi kedua tokoh tersebut yaitu Bupati dan wakilnya, dan juga sikap kedua pejabat daerah tersebut yaitu Ir. Mawardi Ali dan Tgk Husaini A Wahab yang tetap membuka jalur komunikasi dan bersikap baik satu sama lain, sesungguhnya seperti sudut pandang tim dalam melihat konflik ini ada pada kedudukan mereka sebagai Bupati dan Wakilnya sebagai pejabat daerah yang berusaha menyuarkan dan mensukseskan aspirasi yang ditampungnya, namun apabila kita melihat dari pribadi kedua sosok ini merupakan sosok yang baik dari segi keilmuan dan sosial masing-masing sehingga konflik ini dapat diakhiri dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. (2018). Konflik Pilkada di Kabupaten Bulukumba Studi Terhadap Ketegangan Politik menjelang dan pasca pilkada serentak tahun 2015.
- Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi.
- Arsal, T. (2004). Partisipasi Politik Elite Agama Islam di Kota Magelang Usul Penelitian. FIS Unnes.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi.
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.
- Hatta, A. Y. (2017). Agenda Konsolidasi Demokrasi: Upaya Muhammad Ashraf Ghani Dalam Membangun Good Governance Di Afghanistan Tahun 2014-2016.
- Hoogerwerf, A., (1985). *Politikologi pengertian dan problem-problemya*. Jakarta Pusat: Erlangga.
- Ikbar, Y. (2014). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ikhwan, A. H. (2004). *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Kusuma, F. K. (2018). *Pilkada Serentak dari Perspektif Konflik*.
- Marijan, K. (2016). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca- Orde Baru Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Noviandikka, P. (2018). *Konflik Politik Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Tahun 2017*.
- Novri, S. (2019). *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta Timur: Prenadamed0069a Group.
- Pekey, F. (2018). *Papua Mencari Jalan Perdamaian Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Pito, T. A. (2019). *Mengenai Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rizki, S. T. (2018). *Strategi Pasangan Mawardi Ali dan Tgk. Husaini A Wahab Dalam Memenangkan Pilkada 2017 di Aceh Besar*.
- Rush, M. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suwendra, W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.
- Ulfa, A. M. (2017). *Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati Periode 2012 – 2017*.
- Varma, S.P. (2016). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaini, Z. (2018). *Konflik Politik Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru*. Malang: Intrans Publishing.

